

**KEDUDUKAN AKTA NOTARIS ATAS PENDIRIAN BADAN USAHA  
MILIK DESA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG CIPTA KERJA**

Oleh : Andriana Kusumawati

**ABSTRAK**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan badan usaha yang didirikan dengan peraturan desa. BUMDesa kesulitan menjalin kerjasama karena belum ada legalitasnya sehingga sebagian didirikan dengan akta Notaris. Ketentuan UU Desa diubah dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Penelitian ini membahas kedudukan akta Notaris dalam pendirian BUMDesa serta pelaksanaannya pasca UU Cipta Kerja. Metode penelitian yuridis normatif dengan data primer, sekunder, dan tersier. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan analisis. Hasil penelitian kedudukan akta Notaris tidak diperlukan dan bukan kewenangan notaris untuk pendirian BUMDesa, akta Notaris diperlukan untuk perjanjian kerjasama dan pendirian unit usaha BUMDesa yang berbadan hukum. Persoalan multitafsir pendirian BUMDesa dijawab dengan keluarnya UU Cipta Kerja sebagai upaya penegasan status BUMDesa yang didirikan dengan peraturan desa sehingga ada kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam kerjasama. Peraturan desa yang menetapkan pendirian BUMDesa didaftarkan melalui Sistem Informasi Desa dan terintegrasi pada Sistem Administrasi Badan Hukum dan mendapatkan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum BUMDesa. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak disahkan UU Cipta Kerja, telah ada 10.602 BUMDesa yang telah selesai melakukan pendaftaran. Status BUMDesa yang bersertifikat ini setara dengan perseroan dan koperasi.

Kata kunci : Akta Notaris, Badan Hukum, Badan Usaha Milik Desa.

**THE POSITION OF NOTARIAL DEED ON THE ESTABLISHMENT OF  
VILLAGE-OWNED ENTERPRISES AFTER LAW NUMBER 11 OF 2020 ON  
JOB CREATION**

Andriana Kusumawati

***Abstract***

*In Law Number 6 of 2014 on Villages (village law), village-owned enterprises (VOEs) are business entities established by village regulations. VOEs have difficulty establishing cooperation because there is no legality, so some are established by notarial deeds. Provisions of the village law that were amended in Article 117 of Law Number 11 of 2020 on Job Creation (job creation law). This study discusses the position of the notarial deed in the establishment of VOEs and its implementation after the job creation law. Normative juridical research methods with primary, secondary, and tertiary data. The study used the approach of legislation, concepts, and analysis. The result of the research is position a notarial deed isn't required and not the authority of a notary for the establishment of VOEs, the notarial deed is required for cooperation agreements and the establishment of business units incorporated VOEs. The issue of multi-interpretation of the establishment of VOEs is answered by the job creation law as an effort to affirm the status of VOEs established by village regulations so that there is legal certainty and legal protection in cooperation. Village regulations that stipulate the establishment of VOEs are registered through The Village Information System and integrated into The Legal Entity Administration System and obtain a VOEs legal entity registration certificate. Within 1 (one) year since the ratification of the job creation law, there have been 10,602 VOEs who have completed registration. This certified VOEs status is equivalent to companies and cooperatives.*

*Keywords: Notary Deed, Legal Entity, Village-owned Enterprise.*